

**FUNGSI BUMDES DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI
MASYARAKAT DI DESA KENALI KECAMATAN
BELALAU KABUPATEN
LAMPUNG BARAT**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat
–Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Dalam Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi**

Disusun Oleh :

**LIANA RAHMA SARI
NPM. 1541020067**



**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

**FUNGSI BUMDES DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI
MASYARAKAT DI DESA KENALI KECAMATAN
BELALAU KABUPATEN
LAMPUNG BARAT**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat
–Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Dalam Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi**

Oleh :

**Liana Rahma Sari
NPM. 1541020067**

Program Studi : Ekonomi Syariah

**Pembimbing 1 : Prof. Prof. Dr. Khomsyahrial Romli, M.Si
Pembimbing 2 : Drs. Mansur Hidayat, M.Sos.I**

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

ABSTRAK

Pemberdayaan ekonomi adalah upaya memperkuat posisi ekonomi mikro yang dimiliki oleh keluarga dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat hidup. Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dimaksud dalam skripsi ini adalah kegiatan mengajak masyarakat untuk memberdayakan ekonomi dengan mengembangkan usaha melalui program BUMDes. Bila BUMDes benar-benar dijalankan secara aktif maka dapat memperkuat atau meningkatkan akumulasi modal masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program pemberdayaan yang telah dijalankan adalah infrastruktur, pelayanan sosial dasar, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, Mitra Usaha Desa, Pemberdayaan dan penelitian. BUMDes juga sebagai pendamping masyarakat dalam mengelola dana pengembangan usaha yang bertujuan untuk membantu dalam permodalan dalam bentuk simpan pinjam

Penelitian ini berjudul Fungsi BUMDes Bina Tani dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat, memiliki tujuan yaitu Untuk mengetahui Fungsi BUMDes Bina Tani dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Bara. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tehnik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, interview dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini yaitu BUMDES Bina Tani di Desa Kenali. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik simple random sampling dengan penentuan jumlah sampel. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan reduksi penyajian data dan verifikasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan BUMDES Desa Kenali dilakukan secara baik, BUMDES melakukan Penyuluhan, Pelatihan dan Pendampingan dengan baik, dana yang terkumpul masuk kedalam kas desa, yang kemudian dana tersebut dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat secara fisik maupun non

fisik. Adapun berbagai unit usaha yang dikelola oleh BUMDes Bina Tani memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya dengan bekerja sama dengan BUMDes. BUMDes Memberi lapangan kerja bagi masyarakat, usaha masyarakat termobilisasi sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki masyarakat

Kata Kunci: Fungsi BUMDES.



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 ☎ (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Fungsi BUMDES dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat
NAMA : Liana Rahma Sari
NPM : 1541020067
JURUSAN : Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

MENYETUJUI

Untuk Dimunagasyahkan dan Dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. Khomsyahrial Romli, M.Si
NIP. 196104091990031002

Drs. H. Mansur Hidayat, M.Sos.I
NIP. 196508171994031005

Mengetahui,

Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

Drs. H. Mansyur I. M.Sos.I
NIP. 196508171994031005



PEGESAHAN

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721) 703260

PEGESAHAN

Skripsi dengan judul: **FUNGSI BUMDES DALAM
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA
KENALI KECAMATAN BELALAU KABUPATEN LAMPUNG
BARAT**, disusun oleh **Liana Rahma Sari** NPM: **1541020067**,
Jurusan: Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) telah diujikan pada
sidang munaqasyah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden
Intan Lampung pada Hari/tanggal : Kamis, 23 Juni 2022

TIM MUNAQOSYAH

Ketua Sidang : Dr. H. Zamhariri, S.Ag.,M.Sos.I

(.....)

Sekretaris : Hasanul Misbah, M.Pd

(.....)

Penguji Utama: Hj. Mardiyah, S.Pd., M.Pd

(.....)

Pembahas I : Prof. DR. H. Khomsahrial Romli, M.Si

(.....)

Pembahas II : Drs. H. Mansur Hidayat .M.Sos.I

(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi



**Dr. Abdul Sy Ag
NIP. 1970092 008**

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنِّ وَّالٍ - ١١

Artinya : *Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (QS. Ar-Ra'd – 11)*

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirobilalamin dan penuh rasa syukur yang tidak ada hentinya kupinta dan kusempatkan hanya kepada engkau Allah SWT Rabb semesta alam yang maha Esa, dan atas takdir dan segala nikmat-Mu, kau jadikan aku seorang insan yang senantiasa berusaha, berfikir, berilmu, dan beriman kepada-Mu serta sabra dalam menjalani takdir kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini dapat menjadi salah satu langkah awalku dalam meraih cita-cita yang telah kutanamkan sejak kecil, dan skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Ibuku tercinta Mulia Basri dan Ayahku tercinta Nasrun terimakasih atas segala cinta, doa, kesbaran, kasih sayang, keikhlasan dan pengorbanan yang selama ini telah diberikan kepada penulis, berkat pengorbanan jerih payah dan motivasi yang selalu diberikan beliau hingga terselesaikannya skripsi penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan Rahmat-Nya, kesehatan, kemurahan rezeki dan keberkahan umur serta selalu dalam lindungan Allah SWT. *Aminyarabbal'alamin.*
2. Teman-temanku tercinta jurusan Pengembangan Masyarakat Islam angkatan 2015 dan teman-temanku yang telah membantu dan memotivasi hingga terselesaikannya skripsi penulis. Semoga Allah SWT selalu memberikan lindungan, kemurahan rezeki dan kesehatan.
3. Almamaterku tercinta tempat kumencari ilmu yang bermanfaat dunia akhirat UIN Raden Intan Lampung. Semoga selalu jaya dan dapat mencetak generasi-generasi terbaik.

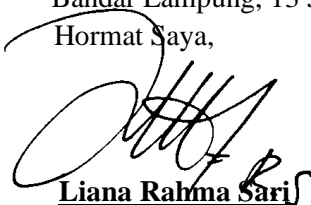
RIWAYAT HIDUP

Penulis sangat bahagia terlahir didunia dan menjadi anak dari seorang ayahanda Nasrun dan Ibunda Mulia Basri, kebahagiaan yang terlipat gandakan karena penulis di anugerahkan nama oleh kedua orang tua yaitu Liana Rahma Sari. Dilahirkan di desa Kenali, Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat pada tanggal 21 Juni 1997. Penulis mengawali pendidikan dimulai dari :

1. TK Dharma Wanita Kenali, tamat 2003
2. SDN 1 Kenali pada tahun 2009.
3. SMPN 1 Kenali, tamat pada tahun 2012.
4. SMAN 7 Bandar Lampung, tamat pada tahun 2015.
5. Strata 1 Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. Lulus 2022

Bandar Lampung, 13 Juni 2022

Hormat Saya,



Liana Rahma Sari

1541020067

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillahirrabillamin kepada Allah SWT atas segala kemudahan, pertolongan, kasih sayang, dan anugrah yang tak bisa diucapkan dengan kata-kata oleh penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, serta shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada nabi Muhammad SAW yang telah memberikan contoh akhlakulkarimah bagi seluruh muslim di seluruh Dunia.

Terwujudnya skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana Sosial dalam Program Pendidikan Pengembangan Masyarakat Islam S1 pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Islam di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan Judul: **“FUNGSI BUMDES DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA KENALI KECAMATAN BELALAU KABUPATEN LAMPUNG BARAT”** Ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik petunjuk maupun saran, langsung maupun tidak langsung terutama di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan, mengingat keterbatasan penulis dalam hal pengetahuan, kemampuan, pengalaman dan juga waktu. Ini yang dapat penulis lakukan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan bagi penyempurnaan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya kepada banyak pihak yang telah banyak membantu dalam proses penulisan skripsi :

1. Bapak Dr. Abdul Syukur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Beserta Wakil Dekan 1,2 dan 3 yang

selalu memotivasi mahasiswa terutama mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.

2. Ibu Drs. H. Mansur Hidayat, M.Sos.I selaku Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Prof. Dr. Khomsyahrial Romli, M.Si Dosen Pembimbing 1 yang telah meluangkan waktu dan sabar dalam membimbing untuk memberikan arahan-arahan terbaiknya, sehingga selesai skripsi ini.
4. Bapak Drs. H. Mansur Hidayat, M.Sos.I selaku Dosen Pembimbing II pada skripsi ini, yang selalu bersedia memberikan bimbingan dan *me-review* kembali skripsi ini.
5. Seluruh Dosen di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
6. Seluruh Staf Administrasi dan juga seluruh karyawan perpustakaan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah melayani mahasiswa nya dengan baik dalam proses menyelesaikan skripsi.
7. Seluruh teman-teman seperjuangan Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Angkatan 2016 yang telah saling *support* dan selalu saling memberikan informasi demi kelancaran satu sama lain.
8. Teman-teman kelas angkatan 2016 yang telah memberikan motivasi-motivasi dan kesegaran melalui tawa dalam menyelesaikan skripsi ini.

Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarokatu

Bandar Lampung,

2022

Hormat Saya.



Liana Rahma Sari

1541020067

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	3
C. Identifikasi Dan Batasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu.....	10
H. Metode Penelitian	12
I. Metode Pengumpulan Data	12
J. Analisis Data.....	12
K. Pemeriksaan Keabsahan Data	13
BAB II LANDASAN TEORI.....	14
A. Lembaga Institusi Masyarakat	14
B. Konsep BUMDES.....	21
C. Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	30
1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi.....	30
2. Tujuan Pemberdayaan Ekonomi	32
3. Tahap-tahap Pemberdayaan Masyarakat.....	32
4. Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	33
5. Indikator Pemberdayaan	38

BAB III BUMDES BINA TANI DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DESA KENALI... 39	
A. Gambaran Umum Desa Kenali	34
B. Fungsi BUMDES Dalam Pemberdayaan Ekonomi.....	34
BAB IV ANALISIS PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DES A KENALI MELALUI BUMDES BINA TANI	57
A. Pemberdayaan Melalui BUMDES.....	57
BAB V PENUTUP.....	60
A. KESIMPULAN.....	60
B. SARAN.....	61

DAFTAR ISI
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis menjelaskan secara keseluruhan isi Skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan maksud dari judul skripsi yang peneliti tulis ini. Adapun judul Skripsi ini ialah **“Fungsi BUMDes Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat”** Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul Skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan tentang pengertian dan maksud dari judul Skripsi ini, yakni sebagai berikut:

Fungsi adalah manfaat, guna, faedah kegunaan suatu hal.¹ Fungsi merupakan bagian dari tugas yang terkait dengan suatu kedudukan atau peran.

Fungsi merupakan sesuatu kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan jabatan ataupun kedudukannya dalam suatu organisasi atau lembaga. Dalam sosiologi sendiri dipahami bahwa fungsi menunjukkan suatu jabatan dalam sebuah organisasi yang menggambarkan tentang tugas dan fungsinya.²

Sedangkan menurut penulis fungsi BUMdes itu sendiri adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan

¹Rahimsyah, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Aprindo Jakarta, 2015), h.150

²Suwarno, *Teori Sosiologi* (Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2012), h.141.

usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) adalah sebagai usaha desa yang dimaksud untuk menampung seluruh peningkatan pendapatan desa, baik yang berkembang menurut adat istiadat maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat dan program proyek pemerintah dan pemerintahan daerah.³

Pemberdayaan adalah proses partisipatif yang memberi kepercayaan dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengkaji tantangan utama pembangunan mereka dan mengajukan kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mengatasi masalah tersebut.⁴

Pemberdayaan merupakan sebuah proses dan tujuan. Pemberdayaan sebagai proses adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau pemberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengenai masalah kemiskinan. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan adalah hasil yang ingin dicapai dari perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial serta mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial,

³ UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, Serta PP No.43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁴ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, Pemberdayaan Masyarakat dalam Persepektif Kebijakan Publik, (Bandung: Alfabeta, 2015), Hal. 61-62.

dan maniri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.⁵

Pemberdayaan ekonomi adalah upaya memperkuat posisi ekonomi mikro yang dimiliki oleh keluarga dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat hidup.⁶ Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dimaksud dalam skripsi ini adalah kegiatan mengajak masyarakat untuk memberdayakan ekonomi dengan mengembangkan usaha melalui program BUMDes. Bila BUMDes benar-benar dijalankan secara aktif maka dapat memperkuat atau meningkatkan akumulasi modal masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program pemberdayaan yang telah dijalankan adalah infrastruktur, pelayanan sosial dasar, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, Mitra Usaha Desa, Pemberdayaan dan penelitian. BUMDes juga sebagai pendamping masyarakat dalam mengelola dana pengembangan usaha yang bertujuan untuk membantu dalam permodalan dalam bentuk simpan pinjam.

Berdasarkan Penjelasan di atas bahwa yang dimaksud dengan fungsi BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BUMdes bina tani sebagai institusi ekonomi pedesaan dalam upaya peningkatan

⁵ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung, PT Refika Aditama, 2010), Cet, Ke-4, h, 59-60

⁶ Hani Yuliwati, *Pemberdayaan Ekonomi Buruh Gedong Wanita, Jumlah Masyarakat Islam*(Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Suka, 2007). h. 110.

pendapatan masyarakat Desa Kenali kecamatan belalau kabupaten Lampung Barat.

B. Latar Belakang Masalah

Sumber daya manusia merupakan suatu modal dasar yang paling utama dalam setiap organisasi. Tanpa adanya sumber daya manusia dapat dipastikan roda organisasi tidak akan bergerak. Peradaban manusia berpangkal pada usaha mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dalam mempertahankan hidupnya. Manusia mengidentifikasi sumber daya alam dengan subansi tertentu.

Potensi desa merupakan segala sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang terdapat serta tersimpan di desa. Dimana semua sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan bagi kelangsungan dan perkembangan desa, ketersediaan sumber daya alam yang limbah ruah yang bisa dimanfaatkan dan di olah menjadi sumber penghasilan namun hal ini keterbatasan pengetahuan dan alat untuk mengolah itu semua kurang memadai sehingga masyarakat banyak yang bergantung pada bantuan pemerintah dan tidak ada pekerjaan yang tetap, hasilnya banyak pengangguran dimana mana yang menjadi masalah utamanya adalah pemerintah terlalu besar intervensi dengan masyarakat dan lembaga juga kurang berjalan dengan baik karna masyarakat tidak di libatkan oleh pemerintah hanya dijadikan sebuah bahan objek pembangunan.

Setidaknya ada banyak potensi alam yang bisa di olah dan dapat menjadi penghasilan masyarakat desa seperti coklat, cengkeh, pisang, dan

kelapa namun sumber daya alam yang harga jual nya berubah ubah yang menjadikan masyarakat petani desa kedaton menjadi rugi sehingga untuk semangat menam kembali menjadi luntur, selain itu juga banyak para pemuda yang setelah lulus SMA langsung mencari pekerjaan di kota lain bukannya memberdayakan potensi lokal yang ada di desa, akhirnya masyarakat banyak menganggur dan tidak bisa memenuhi segala kebutuhan hidupnya masyarakat hanya ingin bukti nyata dalam hal memberdayakan potensi desa yang ada bukan hanya sekedar materi tanpa ada reaksi yang nyata.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumberdaya ekonomi desa yang bertujuan untuk mengoptimalkan aset-aset desa, meningkatkan usaha masyarakat, menciptakan peluang usaha, menciptakan lapangan pekerjaan, pengembangan ekonomi desa serta meningkatkan pendapatan desa. Jika pengelolaan Bumdes optimal, maka desa akan menjadi desa yang mandiri dan mampu mengentaskan kemiskinan dengan meningkatkan kesejahteraan desa. BUMDes sebagai salah satu mitra pemerintah desa dalam mewujudkan rencana-rencana pembangunan perekonomian, ekonomi dituntut mampu menyediakan kebutuhankebutuhan masyarakat dalam mengembangkan usaha⁷

Pembentukan BUMDes merupakan cara untuk memanfaatkan undang-undang yang memberikan kawenangan kepada pemerintah desa untuk melakukan

⁷ Amelia Sri Kusuma Dewi, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*, Volume V No. 1 Februari (2014)

inovasi dalam pembangunan desa, terutama meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan bagi masyarakat desa.⁸ keberhasilan pembangunan dalam masyarakat tidak selalu ditentukan oleh tersedianya sumber dana keuangan dan manajemen keuangan tetapi dipengaruhi oleh peran serta respon masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan ekonomi di pedesaan. Tetapi sayangnya kedudukan BUMDes belum sepenuhnya diatur secara lengkap dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Permasalahan lain yang lebih kompleks adalah dalam hal memilih bentuk badan hukum yang tepat bagi pendirian BUMDes.

Fungsi BUMDes bagi desa yang menjalaninya yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membantu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggara kegiatan ekonomi desa, membantu pemerintah desa dalam upaya mengembangkan sumber sumber potensi alam dan manusia di desa untuk dikembangkan menjadi sumber ekonomi dan menjadi media pemerintah desa untuk mewujudkan rencana pembangunan khususnya dibidang ekonomi.

Dalam cakupan lebih luas, BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa yang akan memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat desa secara luas Berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilandasi oleh UndangUndang Nomer 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Pasal 87 Ayat (1) disebut bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa dan kecantun

⁸ Edy yusuf agunggunanto dkk, *pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan badan usaha milik desa (bumdes)*, vol 13 no 1 (2016)

dalam peraturan pemerintah No 43 tahun 2014. Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung kebijakan daerah kabupaten atau kota yang ikut memfasilitasi dan melindungi usaha masyarakat desa dari ancaman persaingan modal usaha besar. Mengingat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi dipedesaan.

Belalau merupakan sebuah kecamatan yang memiliki beberapa desa kelurahan yang sebagaimana masih berada di wilayah yang memiliki beragam macam potensi pertanian, perdagangan, air bersih dan peternakan yang masih belum dikelola dengan optimal di kecamatan Belalau Lampung Barat. Desa Kenali merupakan Desa yang dikenal dengan desa yang memiliki sumber daya alam yang banyak dengan hasil pertanian yang baik pula. Desa Kenali ini memiliki 12.312 jiwa yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Badan Usaha Desa Kenali didirikan pada tanggal 12 Juli 2016 badan usaha desa Kenali kemudian diberi Nama Badan Usaha Milik Desa Bina Tani atau biasanya disingkat dengan nama "BUMDes Bina Tani" telah disahkan dan ditetapkan melalui peraturan desa .

BUMDes Bina Tani sudah berjalan selama kurang lebih 3 Tahun belakangan ini tetapi masih terlihat adanya ketimpangan kesejahteraan di desa tersebut. Pemerintah desa telah membuat Badan Usaha Milik Desa Bina Tani yang bertujuan untuk menambah pendapatan asli desa dan juga mensejahterakan masyarakat tetapi dalam dua tahun berdirinya Badan Usaha Milik Desa tersebut ternyata belum dapat mensejahterakan seluruh masyarakat yang ada di desa Kenali. Hal ini dikarenakan BUMDes hanya bergerak di bidang hasil pertanian yang

sangat sederhana yaitu penggilingan kopi, penggilingan padi, serta sebagai penyalur hasil pertanian ke pengepul.

Realitas yang ada bahwa masyarakat di desa tersebut kurang nya pemahaman tentang dalam mengelola kopi, dan mayoritas mata pencaharian di desa kenali tersebut sebagai petani kebun, dengan itu BUMDes Bina Tani memberikan fasilitas berupa mesin penggiling kopi dan modal usaha juga. Masyarakat sebelum adanya BUMDes Bina Tani, menjual biji kopi seadanya, karena masyarakat kurang nya pengetahuan dan kemampuan nya sehingga tidak bisa memproduksi biji kopi menjadi bubuk kopi.

BUMDes Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat yaitu sebagai fasilitator yang memfasilitasi masyarakat dalam melakukan kegiatan yang berlangsung dan hal ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat petani yang berada di Desa Kenali Kecamatan Belalau, kemudian BUMDes Bina Tani mendatangkan fasilitator yang berasal dari Bogor untuk memberikan pengajaran kepada masyarakat dalam penanaman kopi yang baik itu seperti apa, pemupukannya sebaiknya seperti apa serta perawatannya pula harusnya seperti apa ,kemudian fasilitator juga memberikan pemahaman bahwasannya kopi dapat di ubah nilainya jika di kelola secara baik contohnya jika kopi di olah menjadi kopi robusta bubuk yang ber label Kopi Lampung Robusta maka harganya akan lebih tinggi di banding dengan menjual kopi dalam bentuk biji.

Kemudian BUMdes juga memberitahukan masyarakat dalam penjualan kopi tidak hanya di jual di pasar atau di warung-warung saja tetapi dapat di jual

menggunakan media sosial yang mana akses penjualan lebih luas di banding di jual di pasar saja..Setelah hadir nya BUMDes Bina Tani masyarakat lebih produktif dalam mengelola kopi dan lebih semangat dalam penjualannya karena pendapatan masyarakat setelah hadirnya BUMdes menjadi lebih baik dan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan kopi robusta menjadi lebih baik.Selain dalam penjualannya dan pengolahannya BUMdes juga mengajarkan masyarakat dalam pengemasan kopi harus sedemikian menarik agar pembeli lebih tertarik melihat produksi yang telah masyarakat hasilkan.

Dari uraian masalah diatas maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Fungsi BUMDES Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat”. BUMDes Bina Tani berfungsi untuk mengelola, dan memberikan fasilitas kepada masyarakat di Desa Kenali Lampung Barat

C. Fokus Penelitian

Peneliti memfokuskan masalah terlebih dahulu agar ada batasan masalah dan tidak terjadi perluasan masalah yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada Proses Pemberdayaan Ekonomi terhadap BUMDes Bina Tani dalam pengolahan biji kopi terhadap masyarakat yang ada di Desa Kenali Lampung Barat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah yaitu bagaimana fungsi BUMDes Bina Tani dalam

pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat?

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui Fungsi BUMDes Bina Tani dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan bagi semua pihak, baik secara teoritis maupun praktis, adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dalam memberikan pemahaman mengenai fungsi BUMDES dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan dapat dijadikan referensi dalam bahan keilmuan, juga untuk memenuhi persyaratan akademik dalam menyelesaikan studi di jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi organisasi sosial yang ada di masyarakat dan sebagai kontribusi atau sumbangsih pemikiran khususnya kepada masyarakat tentang bagaimana fungsi BUMDES dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Kesejahteraan masyarakat telah dilakukan oleh beberapa penulis sebelumnya, hasil dari beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Angger Sekar Manikam. 2010. Implementasi program Badan Usaha Milik Desa di desa Ngeposari Kecamatan Semanu Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2009. Menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, serta literature dan studi pustaka yang melibatkan berbagai elemen masyarakat desa beserta pemerintah desa dan instansi terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Badan Usaha Milik Desa ini belum berjalan dengan baik. Kenyataan tersebut dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat desa masih rendah serta program-program Badan Usaha Milik Desa yang belum berjalan secara keseluruhan serta belum dapat mengakomodir kepentingan potensi kehidupan petani sebagaimana tujuan utama pendirian BUMDes tersebut tingkat partisipasi masyarakat desa masih rendah serta program-program Badan Usaha Milik Desa yang belum berjalan secara keseluruhan serta belum dapat mengakomodir kepentingan, potensi serta kebutuhan petani sebagaimana tujuan utama pendirian tersebut.⁹

2. Abdul Qodir. 2011. Analisis Kelembagaan Dalam Upaya Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Peranan Koperasi Jasa Keuangan Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi

⁹ Angger Sekar Manikam, *Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa Di Desa Ngeposari Kecamatan Semanu Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2009* (Yogyakarta:2010)

Masyarakat Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran Kotamadya).Dipublikasikan sebagai jenis jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Kekhususan Pembangunan Sosial FISIPOL UI. Penelitian ini dimaksudkan untuk mempelajari peran lembaga lokal dalam upaya mewujudkan ketahanan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari pembangunan kesejahteraan masyarakat.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data yang deskriptif dan diperoleh melalui wawancara yang mendalam dengan para informan. Koprasi Jasa Keuangan (KJK) PEMK merupakan organisasi lokal yang dibentuk oleh masyarakat dan berada ditengah-tengah komunitas masyarakat kelurahan, namun belum menjadi sebuah lembaga lokal karena harus menempuh proses kelembagaan didalamnya.¹⁰

2. Agung Septian Wijanarko pada tahun 2012 yang berjudul Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Didesa Pandankrajan Kecamatan Kemilagi Kabupaten Mojokerto Tahun 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengurus dan anggota BUMDes telah berperan baik, baik itu dalam segi permodalan maupaun dalam membantu menetapkan perekonomian masyarakat. Metode yang digunakan adalah deskriptif yang mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mojokerto No. 18 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) penelitian

¹⁰ Abdul Qodir, 2011, *Analisis Kelembagaan Dalam Upaya Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Peranan Koperasi Jasa Keuangan Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran Kotamadya)*(Jakarta:2011)

mengenai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan program BUMDes.¹¹

H. Metode Penelitian

Untuk mempermudah dalam proses penelitian dan memperoleh hasil data dan informasi yang valid, maka dalam tulisan ini peneliti akan mengurai metode penelitian yang digunakan:

1. Pendekatan dan Prosedur Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini mempergunakan data yang dinyatakan verbal dan kualifikasinya bersifat teoritis. Pengolahan data dan pengujian hipotesis tidak berdasarkan statistik melainkan dengan pola hukum tertentu menurut hukum logika.¹² Penelitian kualitatif memanfaatkan data lapangan untuk verifikasi teori yang timbul di lapangan dan terus menerus secara disempurnakan selama proses penelitian langsung yang dilakukan secara berulang-ulang. Selain itu penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah yang bermaksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan yang telah dilakukan dengan jalan yang melibatkan berbagai metode yang ada.¹³

Dalam penelitian ini peneliti berinteraksi secara langsung dengan seluruh elemen yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh

¹¹ Agung Septian Wijanarko Yang Berjudul *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Didesa Pandankrajan Kecamatan Kemilagi Kabupaten Mojokerto Tahun 2012*.(Semarang 2012).

¹² Marzuki, Metodologi Reset, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), h. 15

¹³ Sanapiah Faisal, Format Format Penelitian Sosial, (Jakarta:Pt Raja Grafindo Persada), h. 29

BUMDES di Desa Kenali. Peneliti mendapatkan data dari berbagai sumber, proses penelitian berkembang secara dinamis sesuai dengan keadaan yang ada dilapangan, dalam penelitian ini peneliti menggunakan persepektif teoritis.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dan mendalam, dengan mengangkat data dilapangan, sehingga peneliti terjun langsung kelapangan dalam penelitian ini guna mencari data dan fakta yang terjadi langsung.¹⁴

2. Desain Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuannya yakni untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹⁵ Dalam penelitian ini penulis mengemukakan dan menggambarkan secara apa adanya dan yang sesungguhnya terjadi dilapangan tentang bagaimana proses yang dijalani oleh BUMDes Bina Tani di desa Kenali.

¹⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), h. 41

¹⁵ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Bogor Selatan : Ghalia Indonesia, 2005), h. 54.

3. Tempat dan Partisipan Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat. Partisipan adalah orang yang dapat memberikan informasi yang diperlukan. Pemilihan partisipan dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yaitu penentuan partisipan yang dipilih sesuai dengan kriteria dan tujuan penelitian. Adapun kriteria partisipan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Kriteria Anggota Masyarakat
 - a. Petani kopi dapat memproduksi \ hasil minimal 1 ton pertahun
 - b. Petani kopi masing-masing memiliki luas lahan minimal 2 Hektar
 - c. Anggota Masyarakat memiliki usaha dan mengikuti BUMDES Bina Tani lebih dari 1 tahun

Berdasarkan kriteria tersebut Petani Kopi berjumlah 5 Orang dan yang memenuhi kriteria diatas hanya 3 Orang dan Anggota Masyarakat yang aktif 5 Orang dan yang memenuhi kriteria hanya 2 orang. Maka dengan itu menentukan partisipan sebanyak 4 orang yaitu 2 orang sebagai Petani Kopi Dan 2 orang anggota yang sudah memenuhi kriteria sebagai partisipan.

4. Metode Pengumpulan Data

- a. Metode Observasi

Dalam menggunakan metode observasi ini, peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan secara

sistematis terhadap gejala/fenomena yang diselidiki.¹⁶ Dalam hal ini, pastinya peneliti perlu mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati secara langsung berbagai hal atau kondisi yang ada di lapangan. Metode observasi ini merupakan metode pendukung.

Metode ini digunakan untuk menggali data terkait proses berlangsungnya kegiatan dalam pengolahan biji kopi yang dikelola oleh Masyarakat sebagai Petani Kopi didampingi oleh BUMDes Bina Tani dalam kegiatan produksi kopi hasil perkebunan masyarakat tersebut kemudian mengamati bagaimana BUMDes Bina Tani dapat memberikan pelatihan atau pembinaan serta mengamati respon dari peserta yang mengikuti pelatihan tersebut.

b. Metode Interview

Metode interview atau wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan jalan Tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan tujuan penelitian.¹⁷ Metode interview ini merupakan metode yang paling utama yang penulis gunakan dalam pengumpulan data yang jelas, lengkap dan valid.

Dalam wawancara kualitatif, peneliti dapat melakukan *face to face interview* (wawancara berhadapan-hadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka yang terlibat di dalam penelitian ini yang terdiri orang partisipan. Wawancara-wawancara seperti itu tentu saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur dan bersifat terbuka yang

¹⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta, Bumi Aksara, 1997), h.98

¹⁷ Marzuki, *Metodologi Riset....*, h. 66

dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari partisipan.

Dalam pelaksanaan interview menggunakan interview bebas terpimpin yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan bebas kepada interviewer. Jadi yang dimaksud adalah pedoman (interview guide) yang menjadi catatan-catatan pokok yang telah diarahkan kepada persoalan. Sehingga diharapkan wawancara yang dilakukan lebih luwes dan data yang diungkap lebih mendalam.¹⁸

Interview yang peneliti lakukan kepada BUMDes Bina Tani diwilayah Desa Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat, untuk menggali data Partisipan (Masyarakat), dan Proses Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat sebagai kegiatan produksi kopi hasil perkebunan masyarakat terhadap BUMDes Bina Tani dan untuk dapat menggali informasi yang akurat.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode dengan teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden.¹⁹ dalam penelitian ini agar lebih lengkap, penulis menggunakan dokumentasi sebagai sumber data, baik data primer maupun sekunder.

Data ini dibutuhkan guna melengkapi data lapangan yang peneliti dapatkan, maka penulis melengkapinya dengan metode dokumentasi yang berbentuk tulisan dan catatan yang mendukung dalam memperoleh suatu data tentang Dokumentasi berupa

¹⁸ *Ibid*, h.67

¹⁹ Abdurrahmat Fatoni, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011) h.112

Foto kegiatan produksi kopi hasil perkebunan masyarakat yang dikelola langsung oleh BUMDes Bina Tani

J. Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan dan materi materi yang lainnya yang telah dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai materi tersebut dan untuk memungkinkan peneliti menyajikan yang sudah peneliti temukan kepada orang lain.²⁰ Miles dan Huberman mengemukakan terdapat 3 langkah dalam analisis data, yaitu Reduksi Data, Penyajian Data dan Verifikasi Data.

Analisis Data yang penulis gunakan pada penelitian ini terdapat tiga alur, yaitu:

a. Reduksi Data

Miles dan Huberman mengemukakan, Reduksi data dapat diartikan sebagai proses, pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar, yang muncul dari catatan lapangan. Dalam proses reduksi data ini, penelitian dapat melakukan pilihan-pilihan terhadap mana yang hendak dipilih dan data mana hendak dibuang. Mana merupakan ringkasan, dan cerita-cerita yang sedang berkembang.

b. Penyajian Data

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang

²⁰ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Analisis Data)* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), h. 85

terus memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan demikian penulis dapat menentukan penarikan kesimpulan yang diperoleh dari sekumpulan informasi-informasi dalam proses penelitian.

c. Vertifikasi Data

Kegiatan analisis berikutnya yang penting adalah menarik kesimpulan/vertifikasi dari suatu data. Kesimpulan-kesimpulan “final” mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, bergantung besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan penelitian dan tuntutan-tuntutan pemberian data, tetapi sering kesimpulan itu telah dirumuskan sebelumnya sejak awal, sekalipun seorang penelitian menyatakan telah melanjutkan “secara induktif”.²¹

K . Pemeriksaan Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini meliputi uji kredibilitas data, uji transferability, uji dependability, dan uji confirmability. Dalam penelitian ini , peneliti menggunakan uji kredibilitas untuk menguji keabsahan data. Uji kredibilitas data dilakukan dengan triangulasi.

Triangulasi data diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Terdapat 3 triangulasi dalam keabsahan data., yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah menguji keabsahan data yang dilakukan dengan cara mengecek

²¹ *Ibid*, h.195

data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi sumber akan dilakukan pada BUMDes Bina Tani dan Masyarakat yang terdiri dari petani Kopo di Desa Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

BAB II

BUMDES SEBAGAI LEMBAGA MASYARAKAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT

A. Lembaga (Institusi) Masyarakat

1. Pengertian Lembaga(Institusi) Masyarakat

Secara naluri manusia cenderung hidup berkelompok, dorongan masyarakat untuk hidup berkelompok tidak hanya disebabkan karena manusia itu makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Tetapi juga karena kebutuhan manusia untuk saling berhubungan satu dengan yang lainnya serta tuntutan kehidupan yang tidak mungkin dapat di penuhi oleh diri sendiri. Keadaan ini menyebabkan timbulnya berbagai macam kelompok dalam masyarakat, berbagai macam kelompok yang ada sering di sebut dengan istilah lembaga masyarakat.²²

Lembaga masyarakat ialah sebuah lembaga yang di bentuk oleh pemerintah berdasarkan sebuah kebutuhan yang karena tugasnya berdasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan melakukan kegiatan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan meningkatkan taraf kehidupan, kebahagiaan, dan kesejahteraan masyarakat.²³

Djoko Edi Imrah mengemukakan Lembaga masyarakat adalah sekelompok individu yang secara bersama-sama terikat oleh sebuah kepentingan dan tujuan bersama yang dicapai melalui sebuah tindakan

²² Wursanto, *Dasar-dasar Ilmu Organisasi*, (Yogyakarta :C.V Andi Offset, 2003), h.12

²³ *Ibid*, h.12

kolektif yang menempatkan diri mereka sebagai pelaku dalam proses pemecahan masalah.²⁴ Institusi lokal adalah suatu kelompok yang menampung aspirasi masyarakat, baik yang mempunyai aturan secara tertulis maupun tidak tertulis, tumbuh dalam masyarakat serta bertujuan mencapai tujuan bersama.²⁵

Sedangkan Koentjaraningrat mengemukakan lembaga masyarakat adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas manusia-manusia untuk memenuhi kompleks kebutuhan dalam kehidupan masyarakat. Soerjono Soekantopun mendefinisikan lembaga sosial adalah himpunan norma-norma yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok manusia di dalam kehidupan masyarakat²⁶ Terbentuknya lembaga masyarakat bermula dari tumbuhnya suatu kekuatan ikatan hubungan antara manusia dalam suatu kelompok masyarakat, ikatan hubungan antara masyarakat tersebut sangat erat kaitannya dengan keberlakuan suatu norma sebagai patokan dalam usaha memenuhi kebutuhan kehidupan.

Dari pengertian ini maka penulis simpulkan lembaga masyarakat merupakan sebuah kelompok individu yang bersama-sama terikat oleh sebuah kebutuhan demi mencapai kepentingan bersama dan memiliki sebuah sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas masyarakat serta sebagai

²⁴Djoko Edi Imrah, *Pemberdayaan Istitusi Lokal Dan Implikasinya Bagi Masyarakat*, Jurnal Wacana, vol 10, No.1 Januari 2009, h.82

²⁵ Wursanto, Op.Cit, hlm.12

²⁶ Philipus, Ng., Dan Nurul Aini, *Sosiologi Dan Politik*, (Jakarta: Rjawali Pers, 2011), h.50

sebuah wadah dalam menampung aspirasi masyarakat baik yang tertulis maupun tidak tertulis namun bertujuan mencapai sebuah tujuan bersama.

2. Tujuan dan Fungsi Lembaga(Institusi) Masyarakat

Adapun fungsi lembaga masyarakat menurut Undang-undang No.17 Tahun 2013 pasal 6 yaitu :

- a. Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota atau tujuan organisasi
- b. Pembinaan dan pengembangan anggota masyarakat untuk mewujudkan tujuan organisasi
- c. Penyalu aspirasi masyarakat
- d. Pemberdayaan masyarakat
- e. Pemenuhan pelayanan sosial
- f. Partisipasi masyarakat untuk memelihara ,menjaga dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa
- g. Pemelihara dan pelestari norma ,nilai dan etika dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara.

Dengan fungsi tersebut, Ormas dan LSM bebas melakukan atau membuat program sendiri dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan tidak terlepas dari nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Namun, Ormas dan LSM merupakan bagian dari bentuk masyarakat sipil yang bersifat independen dan mengutamakan kepentingan publik. Kedua lembaga tersebut merupakan kumpulan dari organisasi-organisasi atau institusi-institusi yang menyuarakan kepentingan rakyat. Karakteristik utama masyarakat sipil adalah di ranahnya yang berada antara keluarga dan negara, menikmati otonomi dari negara dan digerakkan oleh kesukarelawanan dari

para anggota masyarakat (White 1994). Dalam sistem politik yang demokratis, masyarakat sipil menjadi unsur yang penting karena menyediakan wahana untuk mengartikulasikan dan memperjuangkan kepentingan rakyat berhadapan dengan negara dan pemerintah yang cenderung dipengaruhi oleh kekuatan pasar dan elite-elite politik. Masyarakat sipil berupaya untuk memelihara atau menguatkan nilai-nilai utama dalam kehidupan sosial

Sedangkan tujuan lembaga masyarakat antara lain :

- a. Untuk kesejahteraan masyarakat dan tidak terlepas dari nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat
- b. Lembaga masyarakat merupakan institusi masyarakat yang bertujuan menyuarakan kepentingan yang ada di masyarakat.²⁷

3. BUMDes Sebagai Lembaga(Institusi) Masyarakat

BUMDes adalah lembaga (institusi) milik masyarakat dan bekerja untuk masyarakat. Dalam pendiriannya BUMDes ini memiliki fungsi yang tujuannya ialah untuk masyarakat, fungsinya ialah:

- a. BUMDes berfungsi untuk meningkatkan pendapatan desa, BUMDes mengumpulkan tabungan dalam skala lokal masyarakat desa melalui pengelolaan dan bergulir serta simpan pinjam.

²⁷Ari Ganjar Hardiansah, Randi “Peran Organisasi Masyarakat Dan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Menopang Pembangunan”. Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi .VOL.1, No.1, hal.52 (Desember 2016).

dan mandiri. Pendirian BUMDes sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan membawa manfaat tersendiri bagi desa yang mendirikannya. Selain untuk peningkatan pendapatan asli desa, BUMDes juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³⁰

BUMDes itu sendiri merupakan Badan Usaha Milik Desa yang didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa dan partisipasi masyarakat. BUMDes juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang di hegemoni oleh kelompok tertentu ditingkat desa. Artinya tata aturan ini terwujud dalam mekanisme kelembagaan yang solid. Penguatan kapasitas kelembagaan akan terarah pada adanya tata aturan yang mengikat seluruh anggota (one for all).³¹

Kemudian di dalam Juknis BUMDes-BPMDK Langkat 2 menjelaskan Badan Usaha ini sesungguhnya telah diamanatkan dalam UU.No.6 Tahun 2014 tentang desa yang dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan menteri Desa,PDT dan transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian ,Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).Sebagai ketentuan yang termaktub dalam peraturan menteri

³⁰ Ibid.,

³¹ Buku panduan pendirian dan pengelolaan Badan usaha Milik Desa (BUMDes), (Departemen pendidikan nasional: Pusat kajian dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) fakultas ekonomi Universitas Brawijaya, 2007), h. 4

kelembagaan akan terarah pada adanya tata aturan yang mengikat seluruh anggota (one for all).³³

Beberapa pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diantaranya:³⁴

- a. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi negara (kementerian desa KDTT) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di desa (selanjutnya disebut desa tradisi berdesa).
- b. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi desa yang bersifat kolektif
- c. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia didesa.
- d. BUMDes merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif desa.

Pasal 213 undang-undnag nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah disebutkan:

- a. Ayat 1 : “desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa

³³Buku panduan pendirian dan pengelolaan Badan usaha Milik Desa (BUMDes), (Departemen pendidikan nasional: Pusat kajian dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) fakultas ekonomi Universitas Brawijaya, 2007), h. 4

³⁴Anom Surya Putra, *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*, (Jakarta: kementerian desa, pembangunan desa tertinggal dan transmigrasi RI, 2015)

- b. Ayat 2 : “badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berpedoman pada perundang-undangan”.
- c. Ayat 3 : “badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundangundangan.

Menurut undang-undang tahun 2014 pasal 6 ayat 1 mengatakan: “Badan usaha Milik Desa atau BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.”

Badan usaha milik desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan potensi desa.³⁵

Lebih lanjut, pengaturan tentang BUMDes di atur dalam pasal 87 UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa yaitu:

- a. Ayat 1: “desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes.
- b. Ayat 2: “BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- c. Ayat 3: “BUMDes dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Karakteristik dari BUMDes terhadap lembaga ekonomi lainnya. Perbedaannya itu antara lain:

³⁵Ibid

- a. Modal usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama.
- b. Dana usaha bersal dari desa 51% dan dari masyarakat 49% melalui penyertaan modal (saham atau andil).
- c. Operasionalnya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (local wisdom)
- d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan kepada potensi dan hasil informasi pasar.
- e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyertaan modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (village policy).
- f. Difasilitasi oleh pemerintah, pemprov, pemkab, dan pemdes.
- g. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD dan Anggota).³⁶

2. Tujuan Pendirian BUMDes

BUMDes pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa. Berikut ini tujuan BUMDes yaitu:

- a. Meningkatkan perekonomian desa,
- b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa,
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa,
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usah antar desa dan/atau dengan pihak ketiga.
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
- f. Membuka lapangan kerja.

³⁶Ibid, h.4-5

- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.³⁷

Pengelolaan dan pendirian BUMDes merupakan salah satu upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang wujudnya sebagai lembaga ekonomi produktif sehingga pengelolaan badan usahanya berjalan secara efektif, efisien, profesional, dan mandiri. Pendirian BUMDes sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan membawa manfaat tersendiri bagi desa yang mendirikannya. Selain untuk peningkatan pendapatan asli desa, BUMDes juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

3. Aspek Usaha/Jenis Usaha yang ada pada BUMDes

Secara umum jenis usaha yang dapat dikembangkan terdiri dari tiga yakni sektor jasa, sektor riil, dan pelayanan pembinaan dan pendampingan usaha. Sektor jasa dalam hal ini termasuk pelayanan jasa keuangan.³⁸

Sektor jasa selain, jasa keuangan adalah jasa angkutan barang, sewa traktor tangan, wisata desa, pengelolaan air bersih, perdagangan sembako dan masih banyak lagi. Saat ini Ditjen PPMD, Kemendesa PDTT mendorong agar pengelolaan pasar desa dikelola oleh BUM Desa, sebagai salah satu sektor jasa. Ke depan, sektor riil juga diharapkan akan tumbuh dan berkembang di desa seperti pengolahan

³⁷ Pedoman Kelola BUMDes, 2019

³⁸ Pedoman Kelola BUMDes, 2019

hasil pertanian, perikanan, peternakan, kerajinan serta penyediaan bahan baku produksi bagi warga masyarakat desa.

a. Unit Usaha Sektor Jasa

1. Unit usaha jasa keuangan (Lembaga Keuangan Mikro) Kegiatan utama pada unit usaha ini adalah melakukan seperti yang dilakukan oleh bank.
2. Unit usaha jasa lainnya seperti : Jasa pengelolaan pasar desa; Jasa penyewaan alat-alat produksi; Jasa angkutan; Jasa pengelolaan air bersih, listrik desa; Jasa pengelolaan wisata; dan lain-lainnya.

b. Unit Sektor Riil

1. Usaha distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyediakan bahan kebutuhan pokok, bahan baku produksi yang dibutuhkan oleh warga masyarakat dari luar desa ke desa. Bahan baku produksi masyarakat seperti sarana produksi pertanian, sarana produksi kerajinan.
2. Unit usaha pemasaran. Kegiatan utama dari unit usaha ini adalah memasarkan hasil-hasil produksi warga masyarakat desa keluar desa. Dalam memasarkan hasil produksi tersebut BUM Desa dapat melakukan upaya untuk meningkatkan nilai tambah produksi melalui kegiatan usaha seperti: Pemilihan (sortasi) produk berdasarkan klasifikasinya kualitas; pengemasan.
3. Unit Usaha Pengolahan. Kegiatan utama dari unit usaha ini adalah melakukan pengolahan

terhadap bahan baku, bahan setengah jadi menjadi barang jadi. Dengan demikian hasil produksi yang dari masyarakat akan memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi.

c. Pelayanan Pembinaan dan Pendampingan Usaha
Pembinaan dan pendamping usaha dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hasil produksi masyarakat dan manajemen usaha yang dilakukan masyarakat desa. Dalam melakukan kegiatan ini BUM Desa dapat bekerjasama dengan pihak lain. Adapun kegiatannya seperti:

1. Melakukan pembinaan tentang peningkatan kemampuan teknis usaha, seperti pelatihan inovasi teknologi, inovasi pemasaran, dsb.
2. Melakukan pembinaan tentang peningkatan manajemen keuangan, manajemen usaha;
3. Menyediakan informasi pasar, teknologi, dan informasi yang berkaitan dengan usaha yang dilakukan oleh masyarakat; dan
4. Melakukan fasilitasi warga masyarakat yang akan memulai usaha baru atau mengembangkan usaha yang telah ada

4. Prinsip Prinsip BUMDes

Dalam pengelolaan BUMDes pemerintah desa dan masyarakat menggunakan prinsip-prinsip yang ada pada BUMDes. Buku panduan BUMDes yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes sangat penting untuk diuraikan, agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota, BPD, Pemerintah

Kabupaten, dan masyarakat. Berikut prinsip-prinsip BUMDes, yaitu:

- a) Kooperatif atau kerja sama.
BUMDes beserta semua komponen yang terlibat harus mampu melakukan kerjasama yang luas, baik tingkat desa ataupun kabupaten demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- b) Partisipatif atau dukungan dan kontribusi Semua elemen atau komponen yang terlibat didalam BUMDes harus bersedia secara sukarela memberikan dukungan serta kontribusi yang dapat memberikan dorongan dengan tujuan kemajuan usaha BUMDes.
- c) Emansipatif atau perlakuan yang sama Pemerintah desa, anggota ataupun masyarakat harus mendapat perlakuan yang sama tanpa membedakan golongan, agama, suku ataupun ras.
- d) Transparan atau terbuka Aktivitas yang berhubungan dengan BUMDes, yang memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat umu harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan terbuka.
- e) Akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan Seluruh kegiatan atau aktivitas yang berhubungan dengan BUMDes harus bisa dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun secara teknis.
- f) Sustainable atau dikembangkan Kegiatan aktivitas harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat ataupun pemerintah desa dalam wadah BUMDes.³⁹

³⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Ibid.*, h.13

Menurut Chabib Sholeh, selain azas pemberdayaan dan desentralisasi, pembentukan dan pengelolaan BUMDes harus berdasarkan pada azas-azas sebagai berikut:

a) Azas kesukarelaan

Azas ini maksudnya adalah keterlibatan seseorang dalam kegiatan pemberdayaan melalui kegiatan BUMDes dilakukan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan atas dasar keinginan pribadi yang didorong oleh kebutuhan untuk memperbaiki kehidupannya

b) Azas Kesetaraan

Azas ini memiliki maksud setiap pihak yang menjadi Stake Holder yang terlibat didalam BUMDes memiliki kedudukan yang setara, tidak dibandingkan mana yang lebih tinggi dan yang paling rendah.

c) Azas Musyawarah

Azas ini memiliki maksud yaitu semua pihak yang terlibat didalam BUMDes diberikan hak untuk mengeluarkan pendapat, gagasan, dan ide pikiran, serta saling menghargai perbedaan pendapat. Dalam pengambilan keputusan harus dilakukan dengan jalan musyawarah sampai mufakat

d) Azas Keterbukaan Azas ini juga memiliki maksud dimana semua yang dilakukan dalam kegiatan atau aktivitas BUMDes harus dilakukan secara terbuka, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan, sehingga dapat saling percaya dan saling menghormati.

5. Klasifikasi Jenis Usaha

Adapun jenis usaha yang sesuai dengan Permendes No. 4 Tahun 2014 Pasal 19, Bab III, Bagian keempat Klasifikasi Jenis Usaha BUMDes, yaitu sebagai berikut:

a) Bisnis Sosial (Social Bussines)

Bisnis Sosial merupakan bisnis yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh finansial, seperti Air Minum Desa, Usaha Listrik Desa, Lumbung Pangan, Sumber Daya Lokal dan Teknologi tepat guna lainnya.

b) Bisnis Penyewaan (Renting)

Bisnis Penyewaan merupakan bisnis yang memberikan pelayanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat desa dan ditujukan untuk memperoleh pendapatan asli desa. Kebutuhan masyarakat yaitu seperti Alat Transportasi, Perkakas Pesta, Gedung Pertemuan, Rumah Toko, Tanah Milik BUMDes, dan Barang sewaan lainnya.

c) Usaha Perantara (Brokering)

Usaha Perantara ini memberikan jasa pelayanan kepada warga desa, misalnya seperti Jasa Pembayaran Listrik, Pasar desa untuk memasarkan produk masyarakat dan jasa pelayanan lainnya

d) Bisnis Bersama (Holding)

Usaha bersama merupakan unit usaha yang dikembangkan masyarakat desa dalam skala lokal desa maupun kawasan pedesaan yang dapat berdiri sendiri dan diatur atau dikelola secara sinergis oleh BUMDes agar tumbuh menjadi usaha bersama. Seperti contoh misalnya:

- 1) Pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya lebih ekspansif
 - 2) Desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat.
 - 3) Kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasi jenis usaha lokal lainnya
- e). Bisnis Keuangan (Financial Business)

Bisnis keuangan merupakan bisnis yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa. Misalnya akses kredit simpan pinjam yang mudah diakses masyarakat desa.

- f). Bisnis Produksi atau Perdagangan (Trading)

Bisnis Produksi merupakan bisnis yang memproduksi atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala yang lebih luas. Seperti contoh Pabrik es, Pabrik asap cair, Hasil pertanian, Sarana produksi pertanian, Sumur Bekas Tambang, dan Kegiatan bisnis produktif lainnya.⁴⁰

6. Pembentukan BUMDes

Tujuan awal pembentukan badan usaha milik Desa (BUMDes) dimaksud untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program atau proyek pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai sebuah usaha sa,

⁴⁰Permendes No.4 Tahun 2014 Pasal 19-24, BAB III, Bagian 4
Klasifikasi Jenis Usaha BUMDe

pembentukan BUMDes adalah benar-benar untuk memaksimalkan potensi masyarakat desa baik itu potensi ekonomi, sumber daya alam, ataupun sumberdaya manusia. Secara spesifik, pendirian BUMDes adalah untuk menyerap tenaga kerja desa meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif mereka yang berpenghasilan rendah. Sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui BUMDes ini adalah untuk melayani masyarakat desa dalam mengembangkan usaha produktif. Tujuan lainnya adalah untuk menyediakan media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat desa sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat. Perubahan/sikap dan cara pandang masyarakat merupakan pondasi yang kokoh bagi terbangunnya lembaga masyarakat yang mandiri, melalui pemberdayaan para pelaku-pelakunya, agar mampu bertindak sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia yang mampu menerapkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakatnya sehari-hari. kemandirian lembaga masyarakat ini dibutuhkan sebagai wadah perjuangan kaum miskin, yang mandiri dan berkelanjutan dalam menyuarakan aspirasi serta kebutuhan mereka dan mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan berkaitan dengan kebijakan publik ditingkat lokal agar lebih berorientasi kemasyarakat miskin dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), baik ditinjau dari aspek ekonomi, lingkungan, termasuk perumahan dan permukiman, maupun sosial.⁴¹

⁴¹Wahyudin kessa, *perencanaan pembangunan desa*, (Jakarta: kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia, 2015), h. 50

Penyusunan rencana usaha penting untuk dibuat dalam periode 1 sampai 3 tahun. Tujuannya agar pengelola BUMDes memiliki pedoman yang jelas apa yang harus dikerjakan dan dihasilkan dalam upaya mencapai tujuan yang ditetapkan dan kinerjanya menjadi terukur. Penyusunan rencana usaha dibuat bersama dengan dewan komisaris BUMDes. Poin lain yang juga dibahas adalah melakukan proses rekrutmen dan sistem penggajian dan pengupahan. Untuk menetapkan orang-orang yang akan menjadi pengelola BUMDes dapat dilakukan secara Musyawarah. Namun pemilihannya harus didasarkan pada kriteria tertentu. Kriteria itu dimaksudkan agar pemegang jabatan di BUMDes mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik.⁴²

C. Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata „*power*“ (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal

- a. Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun.
- b. Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian

⁴²Ibid, h. 52

kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.⁴³

Menurut Sumaryadi yang dikutip oleh Zaili Rusli, dkk⁴⁴ menyatakan bahwa pemberdayaan adalah mendapatkan kekuasaan untuk membuat suara mereka di dengar untuk memberikan kontribusi kepada perencanaan dan keputusan yang dapat mempengaruhi seseorang untuk menggunakan keahlian di tempat kerja untuk meningkatkan kinerja orang tersebut dan kinerja seluruh organisasi.

Selain itu ada yang berpendapat bahwa pengembangan dan pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mengubah suatu keadaan atau kondisi masyarakat yang standar hidupnya sangat rendah ke kondisi yang lebih baik dalam artian ekonomi, social-budaya dan politik⁴⁵.

Menurut Sumodiningrat, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mendirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki, hal ini berarti bahwa masyarakat diperdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Dengan memakai logika ini, dapat dikatakan bahwa masyarakat yang berdaya adalah

⁴³Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2014)., h.58

⁴⁴Zaili Rusli, dkk, *Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP)*, Jurnal Kebijakan Publik, Vol. 3 No. 2, (Pekanbaru: Universitas Riau, 2012)., h 69

⁴⁵Moh. Ali Aziz, Rr Suhartini, A. Halim, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat : Paradigma Aksi Metodologi*, (Yogyakarta: PT Lkis Pelangi Aksara, 2009)., h 72

masyarakat yang dapat memilih dan mempunyai kesempatan untuk mengadakan pilihan-pilihan.⁴⁶

Menurut Samuel Paul pemberdayaan ekonomi masyarakat membutuhkan partisipasi aktif dan kreatif. Menurutnya partisipasi aktif dan kreatif dinyatakan sebagai partisipasi yang mengacu pada sebuah proses aktif yang dengannya kelompok sasaran bisa mempengaruhi arah dan pelaksanaan proyek pembangunan ketimbang hanya semata-mata menerima pembagian proyek⁴⁷ keuntungan.

Konsep pemberdayaan ekonomi telah dicoba diterapkan melalui pelaksanaan program nasional penanggulangan kemiskinan berdasarkan impress No. 5 Tahun 1993 yang kemudian dikenal sebagai program IDT. Semua usaha diarahkan pada kemakmuran. Makmur dalam arti materi yaitu dapat tercukupi segala kebutuhan manusia dan adanya keseimbangan kebutuhan dengan pemuas kebutuhan banyaknya penyebab perbedaan tingkat kemakmuran suatu negara atau masyarakat.

Dengan demikian, menurut hemat penulis pengertian dari pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah suatu upaya untuk membangun daya masyarakat dalam perekonomian khususnya dengan mendorong, memotivasi, dan menggali potensi yang dimiliki sehingga kondisi akan

⁴⁶Soetomo, *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam Perspektif Masyarakat Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014)., h 1

⁴⁷ Abdul Basith, *Ekonomi Kemasyarakatan, Visi dan Strategi Pemberdayaan Sektor Ekonomi Lemah* , (Malang: UIN Maliki Press, 2012), h.29

berubah dari yang tidak berdaya menjadi berdaya dengan perwujudan tindakan yang nyata untuk meningkatkan harkat dan martabat dari sisi ekonomi dan melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan.

2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Ada 3 tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat yaitu mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat, dan perlindungan terhadap masyarakat⁴⁸:

a. Mengembangkan kemampuan masyarakat

Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

b. Mengubah perilaku masyarakat

Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat. Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan, serta pembukaan akses ke

⁴⁸ *Ibid*, h.5

dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat jadi berdaya. Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi.

c. Perlindungan terhadap masyarakat

Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakkan kepada yang lemah amat mendasar berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah.

3. Tahap-Tahap Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu kegiatan yang lebih dalam menekankan pada proses, dalam kaitannya dengan proses maka partisipasi dan keterlibatannya masyarakat dalam setiap tahapan pemberdayaan masyarakat pun memiliki tahapan tahapan sebagai berikut:

- a. Penyadaran, pada tahap ini dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat agar mereka mengerti bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat ini penting bagi kualitas hidup mereka, dan dilakukan secara mandiri.
- b. Pengkapasitasan sebelum diberdayakan, masyarakat perlu diberdayakan kecakapan

dalam pengelolaannya tahap ini sering disebut *cupucity building* yang terdiri dari pengkapasitasan manusia, organisasi dan system nilai

- c. Pendayaan dalam tahap ini target diberikan daya, kekuasaan dan peluang sesuai dengan kecakapan yang sudah diperoleh tahapan program pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah siklus perubahan yang berusaha mencapai taraf hidup yang lebih baik.⁴⁹

4. Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Ada 5 strategi pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, khususnya melalui pelatihan dan advokasi terhadap masyarakat miskin, yaitu⁵⁰ :

- a. Motivasi

Dalam hubungan ini, setiap keluarga harus dapat memahami nilai kebersamaan, interaksi social dn kekuasaan melalui pemahaman akan haknya sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Karena itu, setiap rumah tangga perlu didorong untuk membentuk kelompok yang merupakan mekanisme kelembagaan penting untuk mengorganisir dan melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat di desa. Kelompok ini kemudian

⁴⁹ Fajar Nugraha, *Jejak Pemberdayaan* (Bandung: Yayasan Rumah Zakat, 2019), h. 2

⁵⁰ Edi Suharto, *CSR dan COMDEV Investasi Kreatif Perusahaan*, (Bandung: Alfabeta, 2010)., h. 67

dimotivasi untuk terlibat dalam kegiatan peningkatan pendapatan dengan menggunakan sumber- sumber dan kemampuan-kemampuan mereka sendiri

b. Peningkatan Kesadaran dan Pelatihan Kemampuan

Peningkatan kesadaran masyarakat dapat dicapai melalui pendidikan dasar, perbaikan kesehatan, imunisasi, dan sanitasi. Sedangkan keterampilan-keterampilan vokasional bisa dikembangkan melalui cara-cara partisipatif. Pengetahuan local yang biasanya diperoleh melalui pengalaman dapat dikombinasikan dengan pengetahuan dari luar. Pelatihan semacam ini dapat membantu masyarakat miskin untuk menciptakan mata pencaharian sendiri atau membantu meningkatkan keahlian mereka untuk mencari pekerjaan di luar wilayahnya.⁵¹

c. Manajemen Diri

Setiap kelompok masyarakat harus mampu memilih pemimpin mereka sendiri dan mengatur kegiatan mereka sendiri, seperti melaksanakan pertemuan-pertemuan, melakukan pencatatan dan pelaporan, mengoperasikan tabungan dan kredit, resolusi konflik dan manajemen kepemilikan masyarakat. Pada tahap awal, pendamping dari luar dapat membantu mereka dalam mengembangkan sebuah sistem. Kelompok

⁵¹Totok Mardikanto, Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat*,h.170

kemudian dapat diberi wewenang penuh untuk melaksanakan dan mengatur sistem tersebut.

d. Mobilisasi sumberdaya

Untuk memobilisasi sumberdaya masyarakat, diperlukan pengembangan metode untuk menghimpun sumber-sumber individual melalui tabungan regular dan sumbangan sukarela dengan tujuan menciptakan modal social. Ide ini didasari pandangan bahwa setiap orang memiliki sumbernya sendiri yang jika dihimpun, dapat meningkatkan kehidupan social ekonomi secara substansial. Pengembangan sistem penghimpunan, pengalokasian dan penggunaan sumber perlu dilakukan secara cermat sehingga semua anggota memiliki kesempatan yang sama. Hal ini dapat menjamin kepemilikan dan pengelolaan secara berkelanjutan.⁵²

e. Pembangunan dan pengembangan jejaring

Pengorganisasian kelompok-kelompok swadaya masyarakat perlu disertai dengan peningkatan kemampuan para anggotanya membangun dan memertahankan jaringan dengan berbagai sistem social di sekitarnya. Jaringan ini sangat penting dalam menyediakan dan mengembangkan berbagai akses terhadap sumber dan kesempatan bagi peningkatan keberdayaan masyarakat miskin.⁵³ M Umar Chapra mengakui bahwa untuk merubah

⁵²*Ibid*, h.171

⁵³Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2007), h.109

paradigma pemberdayaan ekonomi rakyat bukan hal yang mudah. Hal tersebut membutuhkan sejumlah perubahan revolusioner dalam lingkungan social ekonomi. adapun menurut beliau ada enam langkah untuk menyokong tegaknya ekonomi rakyat: *Pertama*, perubahan dalam pola gaya hidup pada orientasi cinta produk dalam negeri (*domestic product*) dan memanfaatkan tenaga buruh secara berlimpah. *Kedua*, perubahan sikap dan kebijakan secara resmi yang berpihak pada usaha ekonomi rakyat sehingga usaha ekonomi rakyat tidak dikeluarkan. *Ketiga*, unit usaha ekonomi rakyat harus diberdayakan melalui bantuan baik dalam memperoleh input-input ekonomi yang lebih baik, teknologi yang sesuai, teknik pemasaran yang efektif dan pelayan ekstensi lainnya. *Keempat*, unit usaha ekonomi rakyat juga harus diberdayakan untuk meningkatkan keterampilan melalui training. *Kelima*, diberikan kesempatan untuk mengakses sumber pendanaan

Pemberdayaan tidak sekedar memberikan kewenangan atau kekuasaan kepada pihak yang lemah saja. Dalam pemberdayaan terkandung makna proses pendidikan dalam meningkatkan kualitas individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mampu berdaya, memiliki daya saing, serta mampu hidup mandiri.

Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dicapai melalui penerapan

pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P, yaitu⁵⁴

- a. **Pemungkinan:** menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan structural yang menghambat.
- b. **Penguatan:** memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan- kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
- c. **Perlindungan:** melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dengan yang lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
- d. **Penyokongan:** memberikan bimbingan dan dan dukungan dari masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-

⁵⁴Edi Soeharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, ...h.67

tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan atau posisi yang semakin lemah.

- e. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Adapun prosedur yang dilakukan dilakukan dalam pemberdayaan ekonomi rakyat, yaitu⁵⁵:

- a. Membangkitkan (*enabling*)

Pada umumnya ketidakberdayaan terjadi karena tidak dikenalnya potensi yang dimilikinya. Pada dasarnya, proses *enabling* dilakukan untuk membangkitkan kemauan rakyat yang banyak dipengaruhi oleh persepsi dan pengetahuan atas diri dan lingkungannya.

- b. Memampukan (*empowering*)

Tahap ini bertujuan agar rakyat menjadi mampu atau bahkan lebih mampu dengan dibekali pengetahuan dan bantuan materiil.

- c. Perlindungan (*protection*)

⁵⁵ Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syari'ah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 188

Proses penguatan dan perlindungan terhadap masyarakat dengan memberikan jalan keluar untuk beberapa kesulitan yang dihadapi.

5. Indikator Pemberdayaan

Indicator keberhasilan pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah proses seringkali diambil dari tujuan sebuah pemberdayaan yang menunjukkan pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan social yaitu: masyarakat miskin yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun social seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan social, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.⁵⁶

⁵⁶Achmad Subianto, *Ringkasan dan Bagaimana Membayar Zakat*, (Jakarta : Yayasan bermula dari kanan, 2004)., h 40

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian ini berupa poin-poin yang menjawab dari rumusan masalah dalam bab terdahulu yakni tentang:

1. Penyuluhan

Sebuah proses penyadaran masyarakat agar mengetahui masalah-masalah dan potensi yang ada, sehingga dapat di manfaatkan secara baik dan menjadikan kehidupannya lebih sejahtera ,proses Penyadaran ini dilakukan oleh BUMDes dan Pemerintah Desa untuk masyarakat dengan menggunakan pendekatan mezzo atau pemberdayaan yang dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Kegiatan yang dilakukan adalah diberikan penyadaran berupaya pemahaman dan motivasi akan penting nya memanfaatkan potensi desa secara maksimal dan memperkenalkan BUMDes sebagai wadah untuk memberdayakan masyarakat

2. Pelatihan

Pelatihan ini dilakukan untuk menjadikan masyarakat lebih terampil dalam pengelolaan potensi dan sumber daya yang ada sehingga menjadikan masyarakat lebih terampil dan dapat memperbaiki hidupnya menjadi lebih sejahterah pelatihan ini di lakukan oleh Pengurus BUMDes Swadesa Artha Mandiri tentang pelatihan pengelolaan biji kopi.

3. Pendampingan

Pendampingan disini dilakukan untuk mendengarkan keluh kesah yang di hadapi masyarakat setelah proses pelatihan di lakukan.proses pendampingan ini di lakukan selama 1 bulan sekali sehingga permasalahan yang di hadapi dapat di ketahui secara baik ,seperti pendampingan dalam bidang produksi dan pendampingan dibidang pemasaran.Pendampingan ini di lakukan di Desa Kenali selain mendengar keluh kesah masyarakat proses pendampingan ini juga memantau program yang dilakukan oleh masyarakat sehingga dapat meningkatkan usaha masyarakat menjadi lebih baik dengan cara diberikan arahan dan jika ada masalah dicarikan penyelesaiannya agar usaha yang dilakukan dapat berjalan untuk jangka panjang.

Pengelolaan BUMDes Desa Kenali dilakukan secara baik, dana yang terkumpul masuk kedalam kas desa, yang kemudian dana tersebut dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat secara fisik maupun non fisik. Adapun berbagai unit usaha yang dikelola oleh BUMDes Bina Tani memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya dengan bekerja sama dengan BUMDes. BUMDes Memberi lapangan kerja bagi masyarakat, usaha masyarakat termobilisasi sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka ada beberapa saran yang bisa peneliti ambil:

1. Dalam perencanaan program dan membentuk unit usaha harus melibatkan masyarakat, agar masyarakat bisa berpartisipasi dengan baik dalam pengambilan kebijakan dari pengelolaan BUMDes

2. Untuk pemerintah desa, desa yang transparan dan terbuka, sehingga perencanaan program, anggaran Desa masyarakat mengetahui agar tidak bersifat Top Down dalam pelaksanaan pembangunan desa. Hal ini bisa dilakukan dengan rutin melakukan musyawarah desa.
3. Untuk pengurus dan Anggota BUMDes buatlah Cluster kewirausahaan bagi masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki masyarakat di setiap wilayahnya agar pengembangan ekonomi masyarakat berjalan terpadu dan merata. Bukan hanya dirasakan pada wilayah yang dekat dengan kantor BUMDes saja. Bukanlah unit usaha yang sifatnya kontinyu, dan berikan pelatihan kewirausahaan masyarakat secara berlanjut

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdurrahmat Fatoni, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011

Arbi Sanit, 1995, *Ormas dan Politik*, Lembaga Studi Ilmu Pembangunan, Jakarta

Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*
Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017

Dimock, 1960, *Public Administration*, Rinehart Inc., New York,

Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*
Bandung, PT Refika Aditama, 2010

Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Analisis Data)*
Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010

Rahimsyah, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Aprindo Jakarta, 2015

Suwarno, *Teori Sosiologi* Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2012

Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Persepektif Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2015

UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, Serta PP No.43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

Hani Yuliwati, *Pemberdayaan Ekonomi Buruh Gedong Wanita, Jumlah Masyarakat Islam Yogyakarta*: Fakultas Dakwah UIN Suka, 2007

Marzuki, *Metodologi Reset*, Yogyakarta: Ekonisia, 2005

Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, Bogor Selatan : Ghalia Indonesia, 2005

Nicholas Henry, 1998, *Administrasi Negara dan Masalah Kenegaraan*, Terjemahan Luciana, Rajawali Pers, Jakarta

Sanapiah Faisal, *Format Format Penelitian Sosial*, Jakarta:Pt Raja Grafindo Persada

Tri Pranadji, 2012, *Naskah Akademik RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan*, Jakarta, Selanjutnya disebut Tri Pranadji II

Phillip Eldridge, 1989, *NGOs In Indonesia: Popular Movement or Arm of Government?*, Victoria: The Centre of Southeast Asian Studies Monash University,

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta

Nasikun, *Sitem Sosial Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada,2016

Jurnal:

Viki ade maulana,rosnita,eri saya mar,"*persepsi anggota terhadap kinerja badan usaha milik desa(Bumdes)*" ,jurnal online bidang pertanian, vol 3, no 1 h.15

Rahyunir, *Peranan Lembaga Kemasyarakatan Karang Taruna Di Kota Pekan Baru*, Jurnal Sains Vol 4, No 1, Januari 2015